BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia; walapun sering kali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan adalah sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari; karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan. Walaupun demikian belum tentu mereka jalani. Kesadaran akan kemiskinan yang mereka punyai itu, baru terasa pada waktu mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan sosial ekonomi yang lebih tinggi.

Dengan begitu pada masalah ini akan dibahas tentang “Pembangunan dan Permasalahan Kemiskinan Struktural dan Kultural”.

1. Rumusan Masalah

Dari tema di atas kami dapat merumuskan masalah yang dapat dibahas sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan?
2. Apa jenis-jenis kemiskinan dan pengertiannya?
3. Apa penyebab permasalahan kemiskinan secara struktural dan kultural?
4. Apakah dampak kemiskinan dan fenomena kemiskinan di Indonesia?
5. Apa pembangunan yang dapat mengatasi kemiskianan secara stuktural dan kultural?
6. Tujuan masalah

Adapun tujuan masalah dari “Pembangungan dan Permasalahan Kemiskinan Struktural dan Kultural” sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan kemiskinan.
2. Untuk mengetahui jenis-jenis kemiskinan beserta pengertiannya.
3. Untuk mengetahui penyebeb permasalah kemiskinan secara stuktural dan kultural.
4. Untuk mengetahui damfak dan fenomena kemiskinan di indonesia.
5. Untuk mengetahui pembangunan yang dapat mengatasi pembangunan di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah global yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahamannya mencakup:

1. Gambaran akan kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan social, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup, masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda, melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Kemiskinan pendudukan dunia kebanyakan terdapat di Negara-negara berkembang. Istilah “Negara berkembang’ biasanya digunakan untuk merujuk kepada Negara-negara yang “miskin”. Misalnya, Negara-negara di kawasan Asia Selatan, seperti India dan Bangladesh. Kawasan Negara miskin lainya adalah Negara-negara di kawasan Afrika, seperti Sudan, Rwanda, dan Mali. Kemiskinan tampak menjadi problema serius yang harus segera ditangani. Saat ini, masih lebih dari 1 miliar warga dunia hidup dengan pendapatan di bawah satu dolar sehari.

Indonesia sebagai Negara berkembang tidak luput pula dari ancaman kemiskinan. Meskipun presentase penduduk miskin semakin berkurang setiap tahun, namun jumlah penduduk miskin semakin besar karena semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia.

Berdasarkan data BPS tahun 2006, pada periode 1996-1999, jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena kritis ekonomi, yaitu 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47% menjadi 23,43% pada periode yang sama. Pada periode 1999-2002 terjadi penurunan jumlah pend paduduk miskin sebesar 9,57 juta, yaitu dari 47,97 juta pada tahun 1999 menjadi 38,40 juta pada tahun 2002. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,43% pada tahun 1999 menjadi 18,20% pada tahun 2002. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada periode 2002-2005 sebesar 3,3 juta, yaitu dari 38,40 juta pada tahun 2002 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Persentase penduduk miskin turun dari 18,20% pada tahun 2002 menjadi 15,97% pada tahun 2005.

Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Februari 2005, sebagian besar (64,67%) penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sementara pada bulan Maret 2006 persentase ini turun sedikit menjadi 63,41% (Herimanto,2009:201-202).

Siapakah orang miskin itu ?

Dalam The End of Poverty (2005), Jeffrey D. Sach mengklasifikasikan kaum miskin ke dalam 3 bagian. Pertama, mereka yang hidup dalam extreme poverty, yang satuan rumah tangganya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, kelaparan, tidak mempunyai akses atas layanan kesehatan, tidak mendapat air bersih dan sanitasi, tidak dapat menguasai pendidikan bagi anak-anaknya, tidak mempunyai fasilitas tempat tinggal yang sederhana dan tidak mempunyai kelengkapan harian. Situasi ini banyak terjadi di negara berkembang. Kedua, moderate poverty, mereka yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (seperti di jelaskan pada bagian pertama), tetapi sangat minim dan tidak selalu mampu. Ketiga, relative poverty, mereka yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi berada dibawah rata-rata cara orang hidup di negara yang berangkutan (Syaifullah,2009:24-25).

1. Jenis-jenis Kemiskinan beserta Pengertiannya

Kemiskinan tidak berakar pada masalah yang tunggal. Artinya, kemiskinan tidak disebabkan oleh kekeliruan distribusi keadilan oleh sebuah lembaga negara semata. Akan tetapi, banyak faktor yang melatarbelakangi kemiskinan terjadi. Kemiskinan dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabakan oleh budaya dan mentalitas kemandirian ekonomi yang tidak terbangun di tingkat masyarakat.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang bersumber dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Bukan kesalahan alam atau kesalahan kebijakan pejabat pemerintahan negara, para ahli dan praktisi sosial ekonomi. Kemiskinan kultural terjadi karena yang bersangkutan tidak memiliki kemauan dan kemampuan melihat peluang-peluang yang tersedia untuk mengembangkan diri mewujudkan kemakmuran. Hal itu terjadi karena tak mau dan tak mampu berikhtiar dan belajar baik dengan cara rajin membaca, rajin berkonsultasi dan rajin memperhatikan pengalaman orang lain yang sukses. Demikian juga tidak memiliki keberanian untuk mencoba suatu usaha yang memberi harapan untuk maju. Kalau mereka memiliki sedikit keberanian atau jiwa wirausaha, harus berani memulainya. Demikian juga harus siap untuk gagal, karena gagal itu awal dari kesuksesan. Tentunya kegagalan itu dapat dijadikan pengalaman. Dalam hal ini ada rumus ''trial and error''. Artinya coba-coba salah. Maksudnya orang akan sukses apabila mau belajar dari kesalahan. Dalam dunia bisnis disebut mistik produktif, maksudnya berhasil dari kesalahan. Kesalahan dalam hal ini bukan kejahatan. Kalau kejahatan itu sudah menyangkut ranah dosa. Kesalahan dalam hal ini adalah kesalahan dalam menetapkan langkah menuju keberhasilan. Memang tidak mudah untuk memilih dan memulai suatu usaha. Karena tidak mudah itulah, sering sebagai penyebab munculnya kegagalan. Agar sukses jangan takut memulainya lagi. Bagi yang belum memulai jangan malu bertanya pada mereka yang sudah punya pengalaman. Usaha itu harus dilakukan dengan sabar dan tawakal.

1. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kekaburan penyelenggaraan distribusi keadilan oleh lembaga negara. Singkatnya, kemiskinan struktural bisa dilihat dari maraknya penyelewengan anggaran negara untuk kepentingan publik melalui korupsi.

1. Kemiskinan Natural

Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kondisi fisik masyarakat tidak mumpuni mengembangkan perdayaan ekonomi masing-masing. Misalnya kecacatan fisik yang diderita seseorang.

Masalah kemiskinan di indonesia mulai mendapat perhatian yang besar dan secara nasional yaitu, dikalangan para sarjana ilmu-ilmu sosial dan juga dikalangan khalayak ramai, setelah diselenggarkannya seminar HIPPIS (Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial) yang diselenggrakan di Malang pada bulan November 1979. Sebuah istilah yang dihasilkan oleh seminar tersebut yang kemudian menjadi amat populer dalam penggunaannya dikalangan sarjana ilmu-ilmu sosial dan khalayak ramai adalah istilah *kemiskinan struktural*. Profesor Selo Soemardjan, seorang tokoh sosiologi indonesia terkenal mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian kemiskian struktural adalah “kemiskianan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu, tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.” (1980:5).

1. Penyebab Permasalah Kemiskinan secara Struktural dan Kultural

Menurut pakar dan beberapa ahli, terjadinya kemiskinan dihibungkan dengan penyebab individual atau patologis, keluarga, subbudaya, agensi, dan struktural. Penyebab individual melihat kemiskinan sebagai perilaku, pilihan, dan kemampuan dari si miskin. Penyebab keluarga menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab subbudaya (“subcultural”) menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari yang dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Penyebab agensi melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Penyebab struktural memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial, seperti lemahnya sistem birokrasi dan minimnya kesadaran hukum ditingkat birokrat yang semestinya menjadi cermin masyarakat.

Dalam buku *DEVELOPMENT as FREEDOM* (2000), Amartya Sen, seorang okonom\_filsuf peraih penghargaan nobel ekonomi pada tahun 1998, menjelaskan bahwa faktor terciptanya kemiskinan selain terkait dengan ideologi suatu bangsa, budaya, dan lingkungan sebuah negara tinggal, sesungguhnya kemiskinan juga dapat tercipta karena kurangnya pendapatan (lack of income) bukan karena kurangnya kemampuan (lack of capability).

Dalam beberapa hal, teori atau pendekatan ini banyak dikritik para pakar ilmu sosial karena kemiskinan hanya dianggap sebagai masalah ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya pendapatan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Padahal menurut beberapa ahli dan boleh jadi Sen tidak hanya melihat faktor tersebut sebagai penyebab utama. Akan tetapi, setidaknya kita tahu bahwa kemiskinan bukan hanya dikarenakan ketidak mampuan, kekurangan, keterbatasan ataupun kelemahan seseorang. Kemiskinan juga disebabkan oleh minimnya pendapatan yang diperoleh. Ini salah satu penyebab seseorang terperangkap dalam jurang kemiskinan.

Andaikan setiap orang diberi kesempatan yang sama atau kondisi-kondisi itu terjadi dalam sebuah negara, sebagaimana pernah ditegaskan pemikir politik prancis *alexis de tocqueville*, niscaya jurang kemiskinan atau kesenjangan sosial akan hilang. Keadaan tersebut dapat menciptakan kedaulatan rakyat yang lebih demokratis dan sejahtera.

Terkait dengan beberapa penjelasan di atas setidaknya kita dapat melihat secara garis besar bahwa terdapat pembagian mengenai masalah kemiskinan. Sekurang-kurangnya terdapat dua faktor utama penyebab timbulnya kemiskinan. Dalam konteks ini kita dapat membagi jenis kemiskinan dalam distingsi yang jelas, seperti kemiskinan kebudayaan dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kebudayaan terjadi disebabkan adanya kesalahan pada subjek. Misalnya malas, apastis, tidak percaya diri, gengsi, tidak memiliki jiwa wirausaha yang mumpuni, serta tidak mempunyai kemampuan dan keahlian, sebagaimana telah dibahas di atas.

Kemiskinan struktural biasanya terjadi disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor ini secara tidak langsung menyebabkan seseorang menjadi miskin. Misalnya pemerintah yang tidak adil, korup, paternalistik, birokrasi yang lemah, minimnya kesadaran hukum dan penegakannya serta ketidakpastian ekonomi politik secara umum.

Dalam konteks ini gagasan atau beberapa akar kemiskinan yang ditelusuri oleh Isbandi Rukminto Adi (*senior programer community development*) menarik untuk dilihat. Ia melihat bahwa akar kemiskinan dapat dikaji berdasarkan level permasalahan. Pembagian berdasarkan beberapa dimensi sebagai berikut.

1. Dimensi mikro yaitu mentalitas materialistik dan keinginan serba cepat (instant).
2. Dimensi mezzo yaitu melemahnya kepercayaan sosial (social trust) dalam komunitas dan komunikasi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap si subjek itu sendiri.
3. Dimensi makro yaitu kesenjangan (ketidakadilan) pembangunan daerah yang minus (‘desa’) dengan daerah yang surplus (‘kota’).

Strartegi pembangunan kurang tepat (tidak sesuai) dengan kondisi sosio demografis masyarakat indonesia. Ketimpangan semacam ini meningkatkan arus migrasi, terutama kalangan muda yang cenderung ingin mengejar mimpi kesejahteraan di kota-kota besar seperti Jakarta.

1. Dimensi global yaitu adanya ketidakseimbangan relasi antara negara yang sudah berkembang dengan negara yang sedang berkembang.

Akar-akar kemiskinan yang dijelaskan di atas berguna dalam melihat kondisi kemiskinan dan pencarian alternatif pengentasannya. Kita pun dapat melihat kondisi dan kemungkinan keadaan orang menjadi miskin atau mengalami kemiskinan.

1. Damfak dan Fenomena Kemiskinan Indonesia
2. Beberapa Damfak Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai damfak negatif yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) ke seluruh tatanan kemasyarakatan. Kemiskinan dapat membunuh mimpi generasi muda dalam menatap masa depan. Bagaimana generasi muda ke depan dapat membayangkan cerahnya masa depan apabila pada hari ini mereka dihantui antara makan dan tidaknya esok.

Persoalan kemiskinan dapat mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat dan ketahanan nasional. Meningkatnya angka pengangguran, kriminalitas, bunuh diri, dan bentuk frustasi sosial lain terutama yang dialami kalangan pemuda yang sudah pesimis mengarungi hidup karena ketiadaan etos kerja, modal sosial ekonomi dan kesempatan untuk aktualisasi diri ikut pula memengaruhi ketahanan sosial bangsa.

Dalam konteks yang filosofis, manusia (termasuk pemuda) secara ekstensial sangat ditentukan oleh pekerjaan. Hal ini karena melalui bekerja ia mengalami ekstensifikasi diri (perluasan diri) sehingga menghasilkan karya yang autentik. Filsafat pekerjaan ini dapat kita temukan dari berbagai pemikiran dan filsuf, seperti Hegel dan Marx. Mereka melihat bahwa kerjalah yang menentukan keberlangsungan eksistensi manusia dalam mengarungi sejarahnya.

Oleh karena itu, lorong kemiskinan dengan segala bentuk dan varian di atas secara eksistensial telah merapuhkan kondisi dan kedaulatan manusia dalam hal ini kaum muda untuk menemukan autentisitas dirinya dengan dunia diluar dirinya. Selain itu, kemiskinan membuat seseorang (si miskin) merasa dirinya semakin “terasing” dan imperior dari lingkungan sekitar. Kemiskinan membuat seseorang menjadi “kaku” berinteraksi dalam masyarakat yang menyebabkan individu kehilangan kebebesan. Situasi dan kondisi ini berpotensi melahirkan kekerasan dan kriminalitas.

1. Fenomena Kemiskinan di Indonesia

Setelah Indonesia dilanda krisis multidimensional yang memuncak pada periode 1997-1999 dan setelah dalam kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara spektakuler dari 40,1% menjadi 11,3%, jumlah orang miskin meningkat kembali dengan tajam, terutama selama krisis ekonomi. Studi yang dilakukan BPS, UNDP, dan UNSFIR menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998, meningkat dengan tajam dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa (BPS,1999). Sementara itu, *international labour organization* (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di indonesia pada akhir tahun 1999 mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3% dari seluruh jumlah penduduk (BPS, 1999).

Data dari BSP (1999) juga memperlihatkan bahwa selama periode 1996-1998 telah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin hampir sama diwilayah pedesaan dan perkotaan. Di wilayah pedesaan angka kemiskinan meningkat menjadi 62,72%, sementara di perkotaan meningkat menjadi 61,1%. Secara agregat, persentase peningkatan penduduk miskin terhadap total populasi memang lebih besar diwilayah pedesaan (7,78%) dibandingkan dengan di perkotaan (4,72%). Akan tetapi, selama dua tahun terakhir ini secara absolut jumlah orang miskin meningkat sekitar 140% atau 10,4 jiwa di wilayah perkotaan, sedangkan di pedesaan sekitar 105% atau 16,6 juta jiwa (lihat Remi dan Tjiptoherijanto, 2002).

Data di atas mengindikasikan bahwa krisis telah membuat penderitaan penduduk perkotaan lebih parah daripada penduduk pedesaan. Menurut Thorbecke (1999), setidaknya ada dua penjelasan atas hal ini. Pertama, krisis cenderung memberi pengaruh lebih buruk pada beberapa sektor ekonomi utama di perkotaan, seperti perdagangan, perbankan, dan kontruksi. Sektor-sektor ini membawa damfak negatif dan memperparah pangaguran di perkotaan.

1. Pembangunan yang dapat Mengatasi Kemiskinan Secara Struktural dan Kultural

Tingkat kemiskinan penduduk di Jawa Barat mengalami peningkatan. Selain itu, nilai Indeks Kemiskinan Masyarakat (IKM) Jawa Barat sebesar 25,2 lebih tinggi dari IKM Nasional (Bapeda Jabar, 2007). Berdasarkan klasifikasi yang diberikan oleh UNDP, derajat kemiskinan penduduk Jawa Barat  berada pada klasifikasi menengah tinggi.

Tingkat kemiskinan penduduk Jawa Barat relatif masih tinggi dan tentu diperlukan peran pemerintah daerah yang lebih maksimal untuk mengentaskannya. Karena sebagian besar penduduk miskin di jawa Barat berada di Desa (60%) maka salah satu jalan pengentasannya adalah dengan kebijakan pembangunan desa.

Berdasarkan data Bapeda Jabar (2007), sebenarnya di Jawa Barat terdapat berbagai Program Penanggulangan Kemiskinan, baik program nasional maupun program khusus pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Program nasional diantaranya adalah:

* Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP);
* Program Jaring Pengaman Sosial (JPS);
* Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
* Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK);
* Dana Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (DOP Puskesmas);
* Program Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah (BS dan DBO Dikdasmen);Dana Operasional dan Pemeliharaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (DOP-SD/MI);
* Jaring Pengaman Sosial Bidang Sosial (JPSBS);Prakarsa Khusus untuk Penganggur Perempuan atau Special Initiative for Women's Unemployment (PKPP/SIWU);
* Padat Karya Perkotaan (PKP);Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE).

Sementara itu, program dari Pemda Jabar yang relevan dengan tema kemiskinan adalah: Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, meliputi:

* Menggali potensi Corporate Social  Responsibility (CSR) baik dari BUMN, BUMD, BMN, BMD dan pengusaha pengusaha swasta. Membentuk koperasi PSM atau binaan binaan PSM.
* Memanfaatkan limbah limbah industri maupun non industri untuk diolah kembali menjadi suatu yang mempunyai nilai ekonomis dan mempunyai nilai jual.
* Menyadarkan para petani dan juga Pemerintah setempat untuk kembali mengunakan pupuk organik dimasa mendatang dengan mendirikan pabrik pupuk organik.
* Turut membina dan menghimpun para pengusaha kecil, agar mereka bangkit dan berdaya dalam menghadapi persaingan usaha.
* Mengembangkan Lembaga Ekonomi Desa atau Badan usaha milik Desa (BUMDES) di tiap tiap Desa.Mencari produk produk unggulan yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
* Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada kelompok usaha bersama - Usaha Ekonomi roduktif (KUBE - UEP).
* Menyelenggarakan pelatihan enterpreunership yang bekerjasama dengan lembaga terkait (KADIN, AKADEMIS dll.).
* Mengadakan dan menyelenggarakan pameran rutin untuk mengangkat produk produk hasil binaan PS. Sedangkan Bidang Pembangunan Daerah Terpencil dan Daerah Pedesaan, meliputi: Turut menjaga nilai nilai tradional yang positif dan dapat dijadikan potensi kearifan lokal.Menghidupkan kembali "Beras Perelek" dan Lumbung Paceklik di Desa Desa.Bersama sama fihak Pemerintah memanfaatkan lahan lahan kritis, agar dapat bermanfaat.
* Turut ambil bagian dalam pelaksanaan, Program Keluarga Harapan (pendamping PKH).Memfasilitasi masyarakat pedesaan dan terpencil untuk mendapatkan akses program program pembangunan.
* Kerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk melaksanakan program-programnya yang di introduksikan ke Desa Desa.Turut serta melaksanakan dan menuntaskan WAJAR-DIKDAS 9 tahun di desa desa atau daerah terpencil, dimana sarana dan prasarana pendidikan sangat minim.
* Turut serta dan mengawasi secara aktif pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT), kalau masih diprogramkan. Penyediaan Pompanisasi bagi masyarakat yang kesulitan air.
* Turut mendata wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Intensifikasi PBB).

Program Terobosan Dalam konteks Jawa barat, pengentasan kemiskinan membutuhkan terobosan-terobosan, mengapa? Karena pemerintahan daerahnya ada (eksis); program pengentasan kemiskinannya sudah ada, tetapi mengapa angka kemiskinan masyarakat Jawa Barat tetap tinggi? Dari pertanyaan inilah kemudian muncul kemestian untuk melakukan terobosan-terobosan.

1. Pertama, apabila anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan di Jawa Barat disalurkan sebagaimana mestinya serta tepat sasaran, maka tentu akan ada penurunan angka kemiskinan, tetapi ini tidak. Mengapa? Barangkali harus ada terobosan untuk melakukan kontrol secara ketat atas penggunaan anggaran yang selama ini diperuntukan bagi pengentasan kemiskinan, jangan-jangan ada praktik korupsi di wilayah itu?
2. Kedua, terobosan untuk mengentaskan kemiskinan dengan tetap memanusiakan warga Jawa Barat yang menjadi sasaran pengentasan kemiskinan. Artinya, pemda provinsi khususnya harus melakukan langkah persuasi untuk menyadarkan warganya yang memang miskin, jangan sampai terjadi warga miskin itu merasa dirinya tidak miskin, ini akan menjadi problem.
3. Ketiga, kelanjutkan dari point kedua di atas, maka harus ada terobosan di tingkat kebijakan agar warga jabar mau dan rela mengentaskan dirinya dari lilitan kemiskinan, sebab kemiskinan  bukan problem tunggal yang harus ditangani oleh pemerintah (dalam hal ini pemda Jabar).

Terobosan tersebut hanya mungkin bisa dilakukan apabila melibatkan stakeholders: Pemda, swasta, dan sektor privat. Jika ketiga komponen stakeholders tersebut bisa duduk sama rendah berdiri sama tinggi untuk bahu membahu membuat dan mengelola terobosan dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat, maka akan ada aneka solusi yang benar-benar bisa mengentaskan kemiskinan di bumi tatar pasundan ini. (Tribun Jabar, senin 20/9/10)

BAB III

KESIMPULAN dan SARAN

1. Kesimpulan

Dari yang sudah dijelaskan pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kemiskinan itu bergantung pada usaha bagaimana kita menghadapi jalannya kehidupan yang kita tentukan, banyak orang berfikir bahwa kemiskinan itu merupakan takdir, padahal kemiskinan itu merupakan nasib yang masih dapat kita ubah selagi masih ada kemauan dan kemampuan yang kita miliki. Jika semua manusia dapat memahami perbedaan antara nasib dan takdir, maka tidak akan ada lagi istilah “Yang Kaya Semakin Kaya dan Yang Miskin Semakin Miskin”.

1. Saran

* Janganlah selalu menggantungkan nasib mu kepada orang lain
* Berusahalah semampumu, dan jangan cepat merasa puas terhadap apa yang sudah kamu dapatkan
* Jangan selalu berfikir hidup itu mengalir seperti air, tetapi berfikirlah bagaimana kita yang mengendalikan air itu tersebut

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.facebook.com/note.php?note_id=140807169297197&id=141259192572817&ref=share>

<http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaminggu&kid=15&id=52469>

Syaifullah,Chavchay.2009:Generasi Muda Menolak Kemiskinan.Cempaka Putih,Klaten

Herimanto dan Winarno.2009:Ilmu Sosial dan Budaya Dasar.Bumi Aksara,Jakarta

Suparlan,Parsudi.2007:Kemiskinan diPerkotaan.Sinar Harapan,Jakarta Timur

Suharto,Edi.2009:Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia.Alfabeta,Bandung